



## Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan Paradigma Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan

Sheilla Nadzlania<sup>1</sup>, Maximiliana Wonga Menge<sup>2</sup>, Arviliani Sisilia Luruk<sup>3</sup>, Novalia Puspa Qarirah<sup>4</sup>  
<sup>1,2,3,4</sup> Fakultas Teknik, Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, Indonesia

### Article Info

#### Article history:

Received Desember 10, 2025  
Revised Desember 13, 2025  
Accepted Desember 27, 2025

#### Kata Kunci:

Pancasila,  
Dasar Negara,  
Paradigma Pembangunan,  
Pembangunan Berkelanjutan,  
Operasionalisasi

#### Keywords:

Pancasila,  
State Foundation,  
Development Paradigm,  
Sustainable Development,  
Operationalization

### ABSTRAK

Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia memiliki posisi ganda: sebagai dasar normatif yang statis (*staatsfundamentalnorm*) dan sebagai paradigma pembangunan nasional yang dinamis. Studi literatur kualitatif ini bertujuan untuk menganalisis peran Pancasila sebagai dasar negara sekaligus paradigma pembangunan nasional yang berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kritis terhadap literatur primer dan sekunder termasuk dokumen konstitusional, karya ilmiah, dan dokumen kebijakan terkait Pancasila, teori pembangunan dan keberlanjutan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pancasila telah kokoh sebagai dasar normatif negara, penafsirannya sering kali masih bersifat formalistik dan terpisah dari implementasi kebijakan praktis. Penelitian ini berhasil mengkonstruksi sebuah paradigma integratif yang menyelaraskan nilai setiap sila Pancasila dengan tiga pilar pembangunan berkelanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan. Sila I (Ketuhanan) memberikan landasan etiko-spiritual untuk tanggung jawab ekologis; Sila II (Kemanusiaan) dan Sila V (Keadilan Sosial) membingkai pembangunan yang inklusif dan berkeadilan; Sila III (Persatuan) menekankan keadilan spasial dan pemerataan serta Sila IV (Kerakyatan) menawarkan pendekatan partisipatif melalui musyawarah. Terdapat kesenjangan yang signifikan antara paradigma ini dengan operasionalisasinya ke dalam kebijakan dan indikator yang terukur. Studi ini menyimpulkan bahwa efektivitas Pancasila sebagai paradigma pembangunan berkelanjutan bergantung pada komitmen politik yang kuat, kerangka kelembagaan yang konsisten, dan transformasi sosio-kultural yang luas. Tanpa pilar-pilar pendukung ini, Pancasila berisiko tetap menjadi cita-cita simbolis daripada pedoman praktis untuk mencapai pembangunan nasional yang berkeadilan, bermartabat dan berkelanjutan.

### ABSTRACT

Pancasila, as the philosophical foundation of the Indonesian state holds a dual position as a static normative basis (*staatsfundamentalnorm*) and as a dynamic paradigm for national development. This qualitative literature study aims to analyze the role of Pancasila as both the foundation of the state and a sustainable national development paradigm. The research method used is a critical analysis of primary and secondary literature including constitutional documents, scholarly works and policy papers related to Pancasila, development theory and sustainability. The findings indicate that while Pancasila is firmly established as the nation's normative foundation, its interpretation often remains formalistic and detached from practical policy implementation. This study successfully constructs an integrative paradigm that aligns the values of each Pancasila principle with the three pillars of sustainable development economic, social and environmental. Sila I (Belief in God) provides an ethical-spiritual foundation for ecological

---

*responsibility; Sila II (Humanity) and Sila V (Social Justice) frame inclusive and equitable development; Sila III (Unity) emphasizes spatial justice and equitable distribution and Sila IV (Democracy) offers a participatory approach through deliberation. A significant gap exists between this paradigm and its operationalization into measurable policies and indicators. The study concludes that the effectiveness of Pancasila as a sustainable development paradigm depends on strong political commitment, consistent institutional frameworks and broad socio-cultural transformation. Without these supporting pillars, Pancasila risks remaining a symbolic ideal rather than a practical guide for achieving just, dignified and sustainable national development.*

---

*This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.*



---

**Corresponding Author:**

Sheilla Nadzlania  
Fakultas Teknik, Universitas Wijaya Kusuma,  
Surabaya, Indonesia  
Email: sheilanadzlania@gmail.com

---

## 1. PENDAHULUAN

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, Pancasila telah menempati posisi sentral bukan hanya sebagai dasar negara tetapi juga sebagai jiwa dan kepribadian bangsa yang mempersatukan keanekaragaman suku, agama, ras dan antargolongan. Rumusan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa merupakan kristalisasi dari nilai-nilai luhur yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Nusantara. Sebagai dasar negara, Pancasila berfungsi sebagai *grundnorm* atau norma fundamental yang menjadi sumber dari segala sumber hukum, memberikan arah dan landasan moral-etis bagi penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara [1]. Namun, dalam dinamika perkembangan zaman, tantangan yang dihadapi bangsa terus berevolusi, mulai dari masalah kebangsaan, demokratisasi, kesenjangan sosial hingga krisis lingkungan global. Diperlukan pemaknaan dan aktualisasi baru terhadap Pancasila agar tidak hanya menjadi simbol statis melainkan paradigma dinamis yang dapat membimbing perjalanan bangsa menuju cita-cita nasional.

Memosisikan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional yang berkelanjutan menjadi suatu keniscayaan strategis terutama dalam merespons kompleksitas tantangan abad ke-21. Konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang digaungkan secara global menekankan pada keseimbangan tiga pilar utama yaitu pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial dan pelestarian lingkungan. Ketiga pilar ini memiliki resonansi yang kuat dengan nilai-nilai Pancasila. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menuntut pembangunan yang inklusif, berkeadilan dan mengutamakan pemenuhan hak dasar manusia. Sila Persatuan Indonesia mengingatkan akan pentingnya pembangunan yang memperkuat kohesi sosial dan mengurangi disparitas antarwilayah. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan menegaskan bahwa proses pembangunan harus partisipatif, demokratis, dan mengakomodasi suara rakyat. Sila Ketuhanan yang Maha Esa dapat dimaknai sebagai landasan spiritual dan etika untuk menjaga harmoni dengan alam karena manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan memiliki tanggung jawab untuk memelihara kelestarian lingkungan [2].

Integrasi Pancasila ke dalam kerangka pembangunan berkelanjutan bukanlah sekadar retorika melainkan suatu pendekatan holistik yang mengakar pada identitas bangsa. Paradigma ini menawarkan

alternatif terhadap model pembangunan yang seringkali terjebak pada pertumbuhan ekonomi semata (*growth-oriented*) yang berpotensi mengabaikan dimensi keadilan dan keberlanjutan ekologis. Pancasila sebagai paradigma menuntut agar setiap kebijakan dan program pembangunan dirancang dan dievaluasi berdasarkan kontribusinya terhadap terwujudnya masyarakat adil dan makmur secara material dan spiritual, menjaga persatuan bangsa serta menjamin keberlanjutan kehidupan untuk generasi mendatang. Melalui pendekatan ini, pembangunan nasional dapat menjadi instrumen perwujudan nilai-nilai Pancasila yang konkret, relevan, dan kontekstual dengan tantangan kekinian. Tulisan ini akan mengelaborasi lebih lanjut bagaimana Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara yang statis tetapi juga sebagai paradigma dinamis yang mampu membimbing arah pembangunan nasional Indonesia menuju tujuan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan bermartabat.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*) untuk menganalisis peran Pancasila sebagai dasar negara dan paradigma pembangunan nasional yang berkelanjutan. Studi literatur dipilih karena sifat penelitian yang bertujuan untuk menggali, menganalisis dan mensintesis pemikiran-pemikiran mendasar yang telah berkembang dalam berbagai teks akademis, dokumen resmi negara serta karya-karya pemikir terkait dengan Pancasila, filsafat pembangunan dan keberlanjutan [3]. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi konsep secara mendalam dan holistik tanpa intervensi langsung terhadap subjek di lapangan sehingga fokus analisis dapat diarahkan pada konstruksi makna, relasi konseptual dan kerangka teoretis. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik *content analysis* (analisis isi) terhadap sumber-sumber tertulis yang relevan dan terpercaya. Analisis data dilaksanakan secara kualitatif-interpretatif melalui beberapa tahapan. Pertama, dilakukan eksplorasi dan kodifikasi terhadap teks-teks untuk mengidentifikasi tema-tema kunci seperti *staatsfundamentalnorm*, paradigma, pembangunan berkelanjutan dan nilai-nilai Pancasila. Kedua, data yang terkodifikasi kemudian diklasifikasikan dan dibandingkan untuk menemukan pola, hubungan, kesenjangan serta konvergensi antar konsep. Ketiga, dilakukan sintesis kritis untuk membangun argumentasi mengenai bagaimana Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai landasan filosofis-statistik tetapi juga dapat dioperasionalkan sebagai kerangka paradigmatis yang menuntun kebijakan dan praktik pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Proses analisis ini senantiasa dilandasi oleh refleksi filosofis dan kontekstual untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan substantif.

### 2.1 Kajian Pustaka

#### 2.1.1 Pancasila sebagai Dasar Negara (*Staatsfundamentalnorm*)

Konsep Pancasila sebagai dasar negara atau *grundnorm* telah banyak dikaji dalam literatur hukum dan ketatanegaraan Indonesia. Merujuk pada pemikiran Hans Kelsen dan Notonagoro, Pancasila dipahami sebagai norma dasar yang mendasari dan mengatasi seluruh norma hukum positif di Indonesia [4]. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan sumber legitimasi konstitusional bagi seluruh peraturan perundang-undangan, sehingga setiap produk hukum tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara bersifat tetap dan final, sekaligus menjadi *leitstar* atau bintang penuntun bagi kehidupan berbangsa. Dalam perkembangannya muncul diskursus tentang kebutuhan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila agar tidak terjebak dalam pemahaman yang formalistik dan doktriner.

#### 2.1.2 Pancasila sebagai Paradigma Keilmuan dan Pembangunan

Konsep paradigma, yang dipopulerkan oleh Thomas Kuhn, merujuk pada kerangka berpikir atau model yang mendasari cara suatu komunitas ilmiah memandang realitas. Beberapa ilmuwan telah

memperkenalkan pemikiran tentang Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia yang berarti nilai-nilainya harus menjadi landasan etis dan epistemologis dalam pengembangan ilmu. Pancasila sebagai paradigma pembangunan, yang menekankan bahwa pembangunan nasional haruslah merupakan pengejawantahan dari kelima sila secara utuh dan menyeluruh. Paradigma ini menolak pembangunan yang sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi (*growth*) tanpa memerhatikan keadilan sosial dan kelestarian lingkungan [5].

### 2.1.3 Teori Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Konsep pembangunan berkelanjutan pertama kali dipopulerkan secara global sebagai "pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri". Konsep ini berdiri di atas tiga pilar utama yang saling terkait ekonomi, sosial, dan lingkungan. Perkembangan mutakhir, seperti yang diadvokasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030, memperluas cakupannya menjadi 17 tujuan yang integratif, mencakup aspek seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender serta aksi terhadap perubahan iklim.

### 2.1.4 Konvergensi Pancasila dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Beberapa literatur telah mencoba menjembatani filosofi Pancasila dengan prinsip-prinsip global pembangunan berkelanjutan. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia secara langsung selaras dengan prinsip keadilan antar generasi (*intergenerational justice*) dan keadilan dalam generasi (*intragenerational justice*) yang menjadi inti dari pembangunan berkelanjutan. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menekankan penghormatan pada hak asasi manusia yang juga merupakan prinsip fundamental dalam SDGs. Sila Persatuan Indonesia mengisyaratkan pentingnya kohesi sosial dan pemerataan pembangunan, sementara semangat musyawarah dalam Sila Keempat sejalan dengan prinsip partisipasi (*participation*) dalam pengambilan keputusan pembangunan. Dimensi spiritual-ekologis dapat ditemukan dalam Sila Pertama, yang menempatkan manusia sebagai bagian dari alam ciptaan Tuhan sehingga memiliki tanggung jawab untuk menjaganya (ekoteologi).

### 2.1.5 Kritik dan Tantangan dalam Operasionalisasi

Meski secara konseptual kuat, kajian-kajian terdahulu juga mengidentifikasi kesenjangan antara idealisme paradigma dan praktik di lapangan. Pancasila sering hanya menjadi slogan sementara kebijakan yang diambil masih cenderung pragmatis, sentralistis dan eksploitatif terhadap sumber daya alam. Tantangan utama yang diidentifikasi meliputi (1) Lemahnya penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam indikator pembangunan yang terukur; (2) Dominannya pendekatan ekonomi kapitalistik yang bertentangan dengan semangat gotong royong dan keadilan serta (3) Rendahnya kesadaran dan komitmen para pemangku kepentingan untuk menginternalisasi nilai Pancasila dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Konstruksi Normatif: Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* yang Hidup

Analisis terhadap dokumen konstitusional dan pemikiran para pendiri bangsa secara tegas mengonfirmasi kedudukan Pancasila sebagai norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*) yang menjadi landasan tertinggi seluruh sistem hukum Indonesia. Temuan kritis dari kajian ini menunjukkan bahwa dalam implementasinya, posisi normatif ini kerap disikapi secara statis dan formalistik. Pancasila sering kali hanya menjadi rujukan simbolis dalam konsideran peraturan perundang-undangan tanpa penjabaran nilai-nilainya yang substantif ke dalam materi kebijakan [6]. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan yang lebar antara norma dasar dan norma turunan, di mana suatu kebijakan sektoral misalnya di bidang pertambangan atau perkebunan dapat secara formal sah menurut undang-undang,

namun secara substantif bertentangan dengan roh Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia karena mengabaikan prinsip kelestarian lingkungan dan pemerataan. Dibutuhkan penafsiran yang dinamis dan kontekstual terhadap Pancasila agar ia tidak menjadi konsep langit yang jauh dari realitas penyelenggaraan negara dan pembangunan.

### 3.2. Pancasila sebagai Paradigma Holistik Pembangunan Berkelanjutan

Sintesis terhadap berbagai literatur filsafat pembangunan dan keberlanjutan berhasil mengkonstruksi suatu paradigma integratif yang memadukan secara organik nilai-nilai Pancasila dengan tiga pilar pembangunan berkelanjutan. Dalam paradigma ini, Sila Ketuhanan yang Maha Esa berperan sebagai landasan etiko-spiritual yang menanamkan tanggung jawab manusia sebagai khalifah untuk menjaga harmoni dengan alam, melampaui pendekatan antroposentris semata. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Sila Keadilan Sosial secara bersama mbingkai pilar sosial dan ekonomi menekankan pembangunan yang berpusat pada manusia (*human-centred*), inklusif dan berkeadilan antargenerasi. Sila Persatuan Indonesia menguatkan dimensi keadilan spasial dengan menuntut pemerataan hasil pembangunan untuk mempersempit kesenjangan antardaerah dan menjaga integrasi nasional. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan memberikan metodologi partisipatif yang meniscayakan pelibatan seluruh pemangku kepentingan melalui musyawarah. Paradigma holistik ini menawarkan kekhasan Indonesia yang menyeimbangkan aspek material-spiritual, individual-kolektif serta hubungan manusia-alam sehingga berbeda dari model pembangunan Barat yang sering kali sekuler dan materialistik [7].

### 3.3. Operasionalisasi Nilai: Dari Konsep ke Indikator Kebijakan

Temuan mendasar sekaligus menantang dalam kajian ini adalah adanya kesenjangan besar antara kekuatan paradigma dan lemahnya praktik operasional. Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, penelitian mengusulkan suatu kerangka operasionalisasi yang mentransformasikan nilai-nilai abstrak Pancasila menjadi prinsip kebijakan dan indikator kinerja yang terukur. Sila Keadilan Sosial tidak boleh hanya dimaknai sebagai pemberian subsidi melainkan harus diwujudkan melalui kebijakan fiskal yang progresif, penguatan akses dan hak tenurial masyarakat atas sumber daya alam, serta penetapan indikator makro seperti rasio gini dan indeks pembangunan manusia (*Human Development Index*) sebagai target utama pembangunan. Semangat Sila Persatuan Indonesia harus tercermin dalam kebijakan desentralisasi yang berkeadilan dan alokasi anggaran pembangunan yang proporsional bagi daerah tertinggal, terdepan dan terluar. Prinsip musyawarah dari Sila Kerakyatan mengharuskan adanya mekanisme persetujuan tanpa paksaan, didahului informasi yang memadai (*Free, Prior, and Informed Consent/FPIC*) dalam proyek-proyek strategis, serta penguatan fungsi pengawasan legislatif dan partisipasi publik. Tanpa upaya konkret operasionalisasi semacam ini, Pancasila berisiko tetap menjadi paradigma yang mandul di tataran wacana sementara kebijakan riil pembangunan masih dikendalikan oleh paradigma pertumbuhan ekonomi (*growth-first*) yang berorientasi jangka pendek [8].

## 4. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pancasila memiliki kedudukan ganda yang fundamental dan dinamis dalam kehidupan bernegara Indonesia. Secara normatif, Pancasila telah kokoh sebagai *staatsfundamentalnorm* atau dasar negara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum. Kesimpulan penelitian ini menggarisbawahi bahwa pemaknaan terhadap kedudukan ini tidak boleh berhenti pada pemahaman yang statis dan formalistik. Agar tidak menjadi konsep yang terasing dari realitas, Pancasila harus terus-menerus ditafsirkan secara kontekstual sehingga mampu menjawab tantangan zaman khususnya dalam mengarahkan pembangunan nasional. Kajian ini menyimpulkan bahwa Pancasila bukan sekadar dasar negara melainkan juga sebuah paradigma pembangunan yang holistik dan berkelanjutan. Paradigma ini berhasil dibangun dengan

menyintesis nilai-nilai intrinsik setiap sila dengan tiga pilar pembangunan berkelanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan. Sila Ketuhanan memberikan landasan etika ekologis; Sila Kemanusiaan dan Keadilan Sosial menuntut pembangunan yang inklusif dan berkeadilan; Sila Persatuan mengedepankan prinsip pemerataan spasial; dan Sila Kerakyatan menawarkan metode partisipatif melalui musyawarah. Integrasi ini menghasilkan sebuah kerangka berpikir pembangunan yang khas Indonesia, yang menyeimbangkan dimensi material dan spiritual serta menempatkan manusia dan alam dalam relasi yang harmonis.

## **REFERENSI**

- [1] Nabila, S., Rahma, S., & Larosa, S. Z. (2023). Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Nasional. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7 (2), 2230-2238.
- [2] Fadilla, D., Azzaro, N. H., Yanti, N. R., & Usiono, U. (2024). Pemahaman Mahasiswa Terhadap Pancasila Sebagai Paradigma Dalam Pembangunan Nasional. *Bersatu: Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika*, 2(1), 62-68.
- [3] Firmansyah, M., & Masrun, M. (2021). Esensi perbedaan metode kualitatif dan kuantitatif. *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(2), 156-159.
- [4] Galuh, N. S., Farhana, F. N., Madina, G. R., & Baiturohmah, V. Z. (2023). Pancasila sebagai Paradigma Ideologi Negara: Implikasi dan Relevansinya dalam Konteks Masyarakat Modern. *Advances In Social Humanities Research*, 1(4), 485-492.
- [5] Hidayatullah, N. S. (2023). Pancasila Dalam Wajah Globalisasi Dan Pembangunan Sustainable Development. *The Indonesian Journal of Social Studies*, 6(2), 64-75.
- [6] Wahyuningsih, S., Sundari, S., & Husnulwati, S. (2021). Pembangunan Berwawasan Lingkungan dalam Kaitan Nilai–Nilai Pancasila Kearah Tujuan Pembangunan Nasional. *Jurnal Education and Development*, 9(3), 415-421.
- [7] Siregar, I. (2024, December). Peran Pendidikan Karakter Berbasis Pancasila Dalam Mendorong Pembangunan Berkelanjutan. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Profesi Guru FKIP UPR* (Vol. 1, No. 1, pp. 125-131).
- [8] Riwayadi, E. (2021). Analisis Paradigma Perusahaan Berbasis Ekonomi Pancasila di Indonesia. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 1(5), 875-866.